

Australia dan Papua Nugini Tanda Tangani Perjanjian Keamanan

CANBERRA (IM) - Australia dan negara tetangganya, Papua Nugini (PNG), menandatangani perjanjian keamanan. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan perjanjian ini menunjukkan kedekatan kedua negara.

Kesepakatan ini dirancang untuk meningkatkan keamanan internal Papua Nugini dengan memberikan lebih banyak bantuan di bidang kepolisian, pertahanan dan peradilan seiring dengan upaya negara tersebut di Kepulauan Pasifik itu mengembangkan ekonominya.

Di tengah persaingan strategis antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) di kawasan ini, pada bulan Mei lalu PNG menandatangani kesepakatan pertahanan dengan AS. Kesepakatan itu untuk meningkatkan pangkalan militer AS dan meningkatkan hubungan perdagangan dengan Tiongkok.

Dalam konferensi pers, Kamis (7/12) Marape mengatakan perjanjian dengan Australia menunjukkan kedua negara "negara bersaudara."

Tetapi ia menambahkan PNG tidak akan memilih-milih dan memiliki kebijakan luar negeri yang "bersahabat dengan semua orang".

Albanese mengatakan kesepakatan tersebut "akan memudahkan Australia untuk membantu PNG mengatasi kebutuhan keamanan internalnya dan bagi Australia dan Papua Nugini untuk saling mendukung keamanan masing-masing dan stabilitas kawasan".

Ia memberikan penghormatan atas dukungan yang diberikan penduduk PNG kepada militer Australia selama Perang Dunia II. Ia mengatakan hubungan pertahanan kedua negara di-tempa melalui pengorbanan.

"Untuk kepentingan kami ke depan, kami tidak memiliki teman yang lebih dekat daripada Papua Nugini," kata Albanese.

Marape mengatakan peradilan, layanan publik, dan perbatasan PNG didirikan Australia sebelum PNG menjadi negara merdeka 48 tahun yang lalu.

"Anda selalu memberi-

dukungan kepada kami. Apa yang terjadi di utara perbatasan Anda memiliki dampak, manfaat, dan konsekuensi yang sangat dalam dan luas di wilayah kami," tambahnya.

Kepada Australian Broadcasting Corp (ABC) Menteri Pasifik Australia Pat Conroy mengatakan kesepakatan tersebut memiliki kekuatan seperti perjanjian.

Australia akan menghabiskan 200 juta dolar Australia atau 130 juta dolar AS untuk membantu melatih polisi dan membangun infrastruktur membantu PNG meningkatkan kekuatan polisi menjadi 10.000 petugas.

Polisi Australia dan negara-negara Persemerakuran lainnya akan dipekerjakan PNG untuk mengisi kekosongan di sekitar 50 posisi manajemen kepolisian dengan kontrak jangka pendek.

Perjanjian tersebut mengatakan peningkatan kemampuan PNG berkontribusi pada "keamanan dan stabilitas regional yang dipimpin Pasifik" dan kedua negara akan memprioritaskan konsultasi satu sama lain mengenai kebutuhan PNG akan peralatan, infrastruktur, dan pelatihan yang berhubungan dengan keamanan.

Karena Tiongkok berupaya meningkatkan kehadiran keamanannya di Kepulauan Pasifik, dengan menandatangani kesepakatan untuk melengkapi dan melatih polisi di Kepulauan Solomon dan Vanuatu, di mana Tiongkok merupakan pemberi pinjaman infrastruktur yang besar, Australia mengatakan keamanan harus disediakan negara-negara Pasifik.

Kesepakatan Australia-PNG mengatakan kedua negara akan berkonsultasi jika ada ancaman terhadap perdamaian di Pasifik atau serangan bersenjata dari luar terhadap salah satu pihak.

Conroy mengatakan itu adalah bahasa yang "sangat kuat" yang sebanding dengan komitmen dalam aliansi keamanan Australia dengan Amerika Serikat.

Kesepakatan ini juga mencakup pembagian informasi rahasia, infrastruktur penting, keamanan siber, maritim, dan penerbangan, serta kesehatan. ● tom



PELUNCURAN BATERAI GOTION DI THAILAND

Para tamu menuliskan tanda tangan pada produk baterai pertama NV Gotion yang didirikan bersama oleh Gotion High-tech dan Nuovo Plus di Siam Eastern Industrial Park di Rayong, Thailand, Kamis (7/12). Yu Qiang, Direktur Pemasaran NV Gotion mengatakan, dengan paket baterai 38 kWh, Baterai Lithium Iron Phosphate menawarkan jarak berkendara hingga 400 km yang akan memenuhi permintaan utama kendaraan kelas A di pasar kendaraan listrik (EV) Thailand.

Yunani dan Turki Sepakat Perbaiki Hubungan Setelah Puluhan Tahun Bermusuhan

Kedua negara juga mengupayakan langkah-langkah membangun kepercayaan militer untuk menghilangkan sumber ketegangan, meningkatkan volume perdagangan dan mengatasi berbagai permasalahan yang memisahkan mereka.

ATHENA (IM) - Yunani dan Turki pada Kamis, (7/12) sepakat untuk memulai kembali hubungan mereka, menetapkan peta jalan yang dirancang untuk mengantarakan era baru hubungan yang lebih erat antara dua sekutu NATO yang merupakan musuh selama puluhan tahun.

Dalam kunjungan penting Presiden Turki Tayyip Erdoğan ke Yunani, kedua negara yang telah lama berselisih sepakat untuk fokus mengupayakan hubungan bertetangga yang baik, menjaga saluran komunikasi terbuka.

Selain itu keduanya mengupayakan langkah-langkah membangun kepercayaan militer untuk menghilangkan sumber ketegangan, meningkatkan volume perdagangan dan mengatasi berbagai permasalahan yang memisahkan mereka, terutama di Laut Aegea.

"Tidak ada masalah di antara kita yang tidak dapat disele-

saikan. Selama kita fokus pada gambaran besarnya dan tidak berakhir seperti orang-orang yang menyeberangi lautan dan tenggelam di sungai," kata Erdoğan usai pertemuan dengan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis di Athena. "Kami ingin mengubah Laut Aegea menjadi lautan damai. Melalui langkah bersama yang akan kami ambil sebagai Turki dan Yunani, kami ingin menjadi contoh bagi dunia," tambahnya sebagaimana dilansir Reuters.

Setelah saling adu mulut selama beberapa tahun terakhir, hubungan dingin antara kedua negara bertetangga itu mencair setelah Yunani dengan cepat mengirimkan bantuan setelah gempa bumi dahsyat di Turki pada Februari.

Berdasarkan standar Yunani-Turki, pertemuan puncak pada Kamis kemarin merupakan pesta persahabatan yang luar biasa dan

tidak pernah ada sebelumnya, dan sangat berbeda dengan kunjungan terakhir Erdoğan pada 2017, di mana kedua belah pihak menyampaikan serangkaian keluhan sejarah sejak masa keruntuhan Kesultanan Utsmaniyah lebih dari satu abad yang lalu.

Pertemuan Mitsotakis dan Erdoğan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan, dan Mitsotakis menyebut Erdoğan sebagai "Tayyip yang terhormat". Erdoğan mengatakan dia memperkirakan akan menerima Mitsotakis di Ankara.

Sekutu NATO ingin meningkatkan volume perdagangan bilateral menjadi USD10 miliar dari USD5 miliar, sementara Erdoğan mengatakan kedua negara bisa mendapatkan keuntungan dari pertemuan tingkat tinggi yang diadakan setiap tahun.

"Geografi dan sejarah telah menentukan bahwa kita hidup di lingkungan yang sama... Tapi saya merasakan tanggung jawab historis untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa kedua negara bagian berdampingan, seperti halnya perbatasan kita," kata Mitsotakis.

Yunani dan Turki telah lama berselisih mengenai berbagai masalah termasuk di mana landas kontinen mereka dimulai dan berakhir, sumber daya energi, penerbangan di

Laut Aegea, dan pulau Siprus yang terpecah secara etnis.

Namun kedua negara ingin menunjukkan bahwa mereka bersedia memperbaiki hubungan mereka.

Turki telah mengupayakan keanggotaan Uni Eropa (UE) selama lebih dari dua dekade. Sejak terpilih kembali pada Mei melalui pemungutan suara yang ketat di tengah krisis ekonomi, Erdoğan mengatakan Turki tetap berkomitmen untuk meningkatkan hubungan dengan mitra dan sekutu Baratnya.

Ankara telah berupaya menarik kembali investor asing, sambil memperbaiki hubungan dengan aktor-aktor regional dan Barat, sebuah masalah yang telah lama berdampak pada perekonomian Turki.

Menyusul krisis utang yang mengguncang zona mata uang euro, Yunani bertujuan untuk mendapatkan kembali pijakannya dan tampil sebagai pilar stabilitas Mediterania timur dalam lingkungan geopolitik yang berubah akibat perang di Ukraina dan konflik Gaza.

Pada Kamis, Yunani menerapkan kembali sistem visa otomatis bagi warga negara Turki untuk mengunjungi 10 pulauunya.

Mitsotakis mengatakan pertemuan akan terus berlanjut dan langkah lebih lanjut dalam dialog bilateral yang

diluncurkan kembali bisa mendekati kesepakatan untuk membatasi landas kontinen dan zona eksploitasi ekonomi (ZEE) terkait - jika kondisinya memungkinkan.

ZEE lepas pantai dapat menjadi awal eksplorasi minyak atau gas. Lebih jauh ke timur, menuju Israel, cekungan Mediterania bagian timur telah menghasilkan beberapa penemuan gas alam terbesar di dunia dalam beberapa tahun terakhir.

Kedua negara berada di ambang perang pada 1990an, dan dalam beberapa tahun terakhir mereka berselisih mengenai sumber daya energi di Mediterania Timur, masalah pertahanan, migrasi dan akuisisi jet tempur, yang mengganggu pembicaraan kerja sama.

Namun "diplomasi gempabumi" - mengingat kondisi serupa yang terjadi pada 1999 - tampaknya kembali membalikkan keadaan.

Dengan nada optimis, Erdoğan mengatakan Turki dan Yunani harus fokus pada hal-hal positif, dan tidak terlalu memikirkan hal-hal negatif.

"Akan lebih bermanfaat bagi masa depan jika kita melihat segala sesuatunya dari sudut pandang setengah penuh," kata Erdoğan kepada Presiden Yunani Katerina Sakellaropoulou. ● tom

Putra Menteri Kabinet Perang Israel Tewas dalam Pertempuran di Gaza

TEL AVIV (IM) - Putra menteri kabinet Israel dan mantan panglima militer, Gadi Eizenkot, tewas dalam pertempuran di Jalur Gaza. Militer Israel tidak memberikan perincian pasti tentang kematian Gal Meir Eizenkot (25), selain mengatakan dia tewas dalam pertempuran di Gaza utara.

"Bersama seluruh Israel, saya menyampaikan dukungan saya kepada Gadi dan seluruh keluarganya, serta pelukan erat. Kami semua berkomitmen untuk terus berjuang demi tujuan suci kematian Gal," kata pemimpin Partai Persatuan Nasional, Benny Gantz dalam sebuah pernyataan, Kamis (7/12).

Eizenkot dan Gantz, yang juga mantan panglima militer, bergabung dengan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak lama setelah serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober yang memicu serangan udara, darat, dan laut Israel di Jalur Gaza Palestina.

Dalam pesan belasungkawa, Netanyahu mengatakan dia sangat sedih atas kematian Gal di medan perang.

Israel terus melakukan pengeboman dan bersumpah untuk memusnahkan kelompok perlawanan Palestina Hamas di Gaza. Lebih dari 17.000 warga Palestina telah terbunuh di Gaza sejak 7 Oktober. Sementara sekitar 1,9 juta orang, atau 85 persen dari populasi telah mengungsi.

Netanyahu mengatakan, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas tidak akan memerintah Jalur Gaza selama Netanyahu menjabat sebagai perdana menteri. Sky News melaporkan, sumber-sumber Palestina mengatakan bahwa,

Abbas telah mengkonfirmasi kesiapan Otoritas Palestina untuk mengambil alih pemerintahan Gaza dan Tepi Barat setelah berakhirnya perang Israel di daerah kantong tersebut.

"Selama saya menjadi perdana menteri Israel, hal ini tidak akan terjadi," ujar Netanyahu menanggapi laporan Sky News.

Mereka yang membesarkan anak-anak mereka dengan terorisme, mendanai terorisme, dan mendukung keluarga teroris tidak akan bisa memerintah Gaza setelah Hamas dinyatakan," ujar Netanyahu.

Pada Selasa (5/13) malam, Netanyahu mengatakan, Gaza harus didemiliterisasi setelah perang berakhir. Dia menambahkan, satu-satunya kekuatan yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah tentara Israel, dan tidak ada pengaturan lain yang dapat diterima.

Netanyahu mengklaim tidak akan mengulangi kesalahan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Oslo. "Merupakan kesalahan besar untuk mengembalikan hal yang paling bermusuhan di dunia Arab dan Palestina ke pusat Tanah Israel," katanya.

Netanyahu menyebut kepegangan awal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) ke Tunisia, sebagai keputusan paling tepat. Netanyahu mengklaim, kesalahan besar adalah mengizinkan organisasi tersebut kembali pada 1994 melalui Otoritas Palestina, berdasarkan Perjanjian Oslo pada 1993. Netanyahu menekankan perlunya Israel memiliki kendali keamanan atas seluruh Jalur Gaza untuk memastikan bahwa entitas teroris tidak muncul pada tahun-tahun mendatang. ● gul

Israel Abaikan Sekjen PBB: Perang Gaza Akan Berakhir dengan Menyerahnya Hamas

TEL AVIV (IM) - Israel menolak mengakhiri perang di Gaza, Palestina, dengan menyatakan perang akan berakhir dengan menyerahnya para pemimpin Hamas dan kembalinya para sandera.

Rezim Zionis mengabaikan seruan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres untuk melakukan gencatan senjata.

"Perang di Gaza dapat berakhir dengan syarat para pemimpin Hamas menyerahkan diri kepada tentara Israel dan para tahanan dipulangkan," kata juru bicara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Ofir Gendelman.

Gendelman mengklaim pa-

sukan militer Israel terus bergerak maju di Jalur Gaza selatan.

"Pasukan kami mengepung rumah [pemimpin Hamas di Gaza] Yahya Sinwar [di Khan Younis] dan misi pasukan kami adalah menangkapnya sesegera mungkin," ujarnya, seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (8/12).

Gendelman menolak seruan Sekjen PBB Antonio Guterres untuk melakukan gencatan senjata di Gaza. "Seruan untuk gencatan senjata sekarang sama saja dengan seruan untuk mempertahankan kekuasaan Hamas di Gaza. Kami dengan tegas menolak hal itu," imbuh dia.

Israel melanjutkan seran-

gan militernya di Jalur Gaza pada 1 Desember setelah berakhirnya jeda kemanusiaan selama seminggu dengan Hamas.

Setidaknya 17.177 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 46.000 lainnya terluka dalam serangan udara dan darat yang tiada henti di wilayah kantong tersebut sejak 7 Oktober menyusul serangan lintas perbatasan oleh Hamas.

Korban tewas Israel dalam serangan Hamas mencapai 1.200 orang, sementara 138 sandera masih ditahan oleh kelompok Palestina di Gaza, menurut angka resmi rezim Zionis. ● ans



PROVINSI ZHEJIANG PROMOSIKAN WISATA BUDAYA DI BULGARIA

Wakil Menteri Pariwisata Bulgaria Irena Georgieva berbicara dalam forum promosi pariwisata budaya Provinsi Zhejiang Tiongkok di Sofia, Bulgaria, Kamis (7/12). Pada acara tersebut disajikan presentasi video tentang Zhejiang, pameran foto, pertunjukan alat musik tradisional Tiongkok, dan upacara minum teh. Kementerian Pariwisata Bulgaria sangat mementingkan pengembangan hubungan Bulgaria-Tiongkok di bidang pariwisata, dan mendukung promosi kerja sama di bidang ini.

Mantan Presiden Peru Alberto Fujimori Bebas setelah Dipenjara 16 Tahun

PERU (IM) - Mantan presiden Peru Alberto Fujimori dibebaskan dari penjara pada Kamis (7/12) setelah mendekam selama 16 tahun. Mantan pemimpin kuat Peru itu dibebaskan dari penjara setelah keputusan Mahkamah Agung Peru memberikan pengampunan kemanusiaan, meskipun ada permintaan dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika regional untuk menunda pembebasannya.

Terlihat lemah dan mengenakan masker, pria berusia 85 tahun itu diterima oleh pengacaranya, dua anaknya Kenji dan Keiko Fujimori - pewaris politiknya dan kandidat presiden tiga kali. Pria keturunan Jepang itu dibantu masuk ke dalam kendaraan yang menunggu di tengah sorak-sorai para pendukungnya, yang membarikade spanduk, membunyikan klakson dan menentakkan "Fujimori Libertad", atau "bebaskan Fujimori".

Dikelilingi oleh para pendukung dan jurnalis, kendaraan tersebut bergerak maju ketika meninggalkan markas polisi dan penjara Barbadillo, tempat mantan presiden tersebut ditahan selama 16 tahun penjara karena korupsi dan memerintahkan pembantaian yang dilakukan oleh pasukan pembunuh tentara pada awal 1990an.

Di mata para pendukungnya, ia menyelamatkan Peru dari terorisme dan keruntuhan ekonomi, sementara para pengkritiknya memandangnya sebagai seorang otoriter yang melakukan kekejaman dan menyalahgunakan demokrasi selama pemerintahannya selama satu dekade pada 1990an, ketika pemerintahannya memerangi gerilyawan Jalan Cemerlang.

Putra seorang imigran Jepang, Fujimori dijatuhi hukuman 25 tahun penjara pada 2009 atas pembantaian pada 1991-1992 yang menyebabkan 25 orang, termasuk seorang anak, ditembak mati oleh pasukan militer rahasia.

Pengadilan internasional, yang mana Peru merupakan salah satu negara penandatanganannya, telah berulang kali mengatakan kepada negara tersebut bahwa Fujimori tidak dapat diampuni karena hukumannya atas kejahatan

hak asasi manusia. Namun, dokter dan kerabat Fujimori mengatakan pria berusia 85 tahun itu menderita sakit maag, penurunan berat badan, hipertensi, dan kanker lidah.

Setelah pengampunan pada Malam Natal 2017, dia dibebaskan dari penjara, meskipun ada kritik dari keluarga korban dan pengadilan hak asasi manusia regional. Tolong jangan bunuh saya. Jika saya kembali ke penjara, hati saya tidak akan tahan, terlalu lemah untuk mengalami hal yang sama lagi. Jangan hukuman mati saya," kata Fujimori pada Oktober 2018, beberapa bulan sebelum dia kembali ke penjara setelah pengampunan awal.

Pembebasan Fujimori, yang menghabiskan waktunya di penjara dengan berkebun dan melukis, menyebabkan dua mantan presiden Peru masih di penjara: Alejandro Toledo, sedang diselidiki karena korupsi, dan Pedro Castillo, yang secara ilegal mencoba membubarkan Kongres setahun yang lalu.

Fujimori meraih kemenangan mengejutkan atas penulis pemenang Hadiah Nobel Mario Vargas Llosa pada 1990, dan lima tahun kemudian memenangkan pemilihan kembali mengalahkan mantan Sekretaris Jenderal PBB Javier Perez de Cuellar.

Dua tahun kemudian, ia mengirimkan tank ke jalan-jalan dan menutup Kongres, mengklaim bahwa anggota parlemen menghalangi upaya stabilisasinya. Pada 1997, Fujimori mendapat pujian atas penyelamatan 71 sandera yang ditahan di Lima selama lebih dari 100 hari. Dia dicopot oleh Kongres pada 2000 setelah sebuah video dirilis yang menunjukkan kepala intelijennya menyuap seorang legislator. Ia mengasingkan diri di Jepang hingga 2005, tetapi ketika dia diekstradisi ke Peru setelah bepergian ke Chile.

Fujimori memiliki empat anak, termasuk Keiko Fujimori, yang kalah dari Castillo dalam pencalonan ketiganya sebagai presiden. Putri Fujimori juga menghadapi masalah hukum, dengan keputusan pengadilan pekan lalu bahwa dia diadili atas tuduhan pencucian uang. ● tom